

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group

Jazim Hamidi, 2011, *A Legislative Drafting*, Yogyakarta: Total Media.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2009. *Green Contitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers.

M. Solly Lubis, 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju.

Mahendra Putra Kurnia, 2011. *Hukum Kewilayahan di Indonesia*. Jakarta; UB Press.

Maria Farida Indrati, 2020. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta; PT Kanisius.

Mutir.Joddowi. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta; Kreasi Total Media

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka: Jakarta

Sirajuddin, 2016. *Legislative Drafting Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setaraperss



Sjafrizal,2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, PT. Rajagrafindo Persada:Jakarta,

Solly Lubis,2011. *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Edisi 2, Cetakan I, Jakarta :PT. Sofmedia,

Widodo Ekatjahjana,2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 Tentang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

C. Jurnal, Skripsi, Makalah

Amir Muhiddin,2013 “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)”, Jurnal Otoritas, Vol. III, No. 2.

Angga Prastyo,2020, Samsul Wahidin, dan Supriyadi, “Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 2.

Bagir Manan,2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH Fak. Hukum UII.

Budi Agus Riwandi,2003, Hukum Internet, Yogyakarta: UII Press.

B. Hestu Cipto Handoyo,2008, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Hasyim Ashari, 2017, “Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”, Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 1.

Henny Andriani,2023. Partisipasi Bermakna sebagai Wujud keterbukaan Dalam pembentukan Undang-Undang, Vol.VII. No 1. Padang;Unes Swara Justicia jurnal,

I Gede Pantja Astawa,2009. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Bandung: Alumni.

Jazim hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011. Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah, UB Press: Malang.

Jimly Assidiqie,2003, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES.

Muhammad Sudarjono,2014. Pembentukan peraturan daerah yang responsive dalam mendukung otonomi daerah, Vol .10. Sumenep: JDIH.

Seta, Salahudin Tanjung, 2020. Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta

Slamet ,Y. 1993. Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi. Surakarta : Sebelas maret university press.

Suwandi. 2018. Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Hukum dan HAM:. Depok.Vol.15 No.3.

Suryono Soekanto,2019. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).

D. Internet

Arizal, *Warga Protes Pemkot Sungai Penuh Buang Sampah di Kawasan Hutan Produksi*

, <http://www.tvonenews.com>

[Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh \(bps.go.id\)](http://bps.go.id)

